

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Transparansi Informasi Publik Di Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Organisasi, kapasitas SDM di Desa Laleten sudah baik karena sebagian dari perangkat desa sarjana, tetapi belum ada peningkatan SDM di desa dan yang menjadi implementor atau menjalankan keterbukaan informasi publik di Desa Laleten tugasnya sekretaris Desa. ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai, dan ada beberapa unit-unit desa seperti kepala desa, Sekretaris desa, Kesie pemerintahan, Kesie kesejahteraan, Kesie pelayanan, Kaur perencanaan, Kaur umum, Kaur keuangan, dan Kepala dusun/RT. dan ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah desa laleten kepada masyarakat seperti; pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi tetapi pemerintah lebih fokus pada pelayanan administrasi. Tidak ada unit khusus untuk menyampaikan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik terkait anggaran, penyampaian informasi tidak efektif karena hanya ada 1 baliho APBDes dan 1 Papan Informasi Desa sedangkan di Desa Laleten terdapat 9 dusun, metode penyampaian informasinya ada secara lisan dan secara tertulis.
2. Interpretasi, pemerintah desa laleten melakukan rapat terbuka secara berkala dalam mendukung keterbukaan informasi publik di desa tetapi tidak semua masyarakat di libatkan dalam rapat tersebut. Dan belum ada perdes yang

mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Desa Laleten. Jadi pemerintah desa laleten melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Aplikasi, Penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Laleten dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pemerintahan, dan sudah dilakukan dengan baik tetapi ada beberapa hal seperti kedisiplin waktu yang belum maksimal.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa harus meningkatkan SDM dalam mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas termasuk dengan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat Desa Laleten dan meningkatkan sarana prasaran dalam pelayanan publik. Dan pemerintah desa harus meningkatkan pelayanan sehingga tidak fokus pada pelayanan administrasi saja tetapi juga pada pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pemerintah Desa juga harus mengadakan unit khusus untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa harus terbuka kepada semua masyarakat Desa Laleten dalam hal rapat atau pelayanan.
3. Pemerintah desa harus meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Desa Laleten dalam hal kedisiplin waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A Muri Yusuf. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta : Prenadamedia Group

Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Agustino, L., 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. In: Bandung: Alfabeta
- Agustino, L., 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Penyadur: Muhadjir Darwin, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: UGM Press.
- George, C. 1980. *Implementasi Publik Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Febrianingsih, N. 2012. *Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintah Terbuka Menuju Tata Pemerintah Yang Baik*. *Rechtvinding BPHN*, 1(1), 135-136
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. USA: Princeton University Press
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*, In : Malang: Intrans Publishing.
- Cairney, Paul. 2012. *Understanding Public Policy: Theories and issues*. London: Red Glode Press
- Uddin, dkk 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media
- Ibrahim, Amin, 2005 *Administrasi Publik Kontemporer (Cakrawala Baru dalam Melihat Secara Sistemik Administrasi Publik)*, Pasca-sarjana, Unpad, Bandung.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan kosep pelayanan publik serta implementasinya*. Bandung: Mandar Maju
- Lembaga Administrasi Negara-RI (LAN-RI), 2003, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta.
- Moenir.2015, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ratminto dan Atik.2015 Belajar Materi “Pengertian pelayanan yogkyakarta; pustaka belajar..
- Santosa. 2008, *Administrasi publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung : Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “KepemerintahanYang Baik” Bagian Pertama: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi*

Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.
Bandung: Mandar Maju.

- Sinambela, 2006 *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*
Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung PT Alfabet
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung: Alfabeta
- Sutmasa, Y. G. 2021. *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*.
Jurnal Cakrawarti, 04(01).
- Tahir, 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta
- Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media
- Wahab, 2011. *pengertian Kebijakan publik* . PT. Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV Citra Malang
- Widodo, J. 2021. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. In Media Nusa Creative (12th ed.)

Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik